

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PENGAWASAN INSPEKTORAT, PENATAUSAHAAN ASET TETAP, DAN KOMITMEN MANAJEMEN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Novan Eko Priyo Wiguno
Dosen Pembimbing: Dr. Rosidi, SE., MM., Ak.

ABSTRAK

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan representasi dari pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah dan menjadi keharusan bagi pemerintah untuk menyajikan laporan keuangannya sebaik mungkin. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal, pengawasan inspektorat, penatausahaan aset tetap, dan komitmen manajemen terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan media pengumpulan data berupa kuesioner yang ditujukan kepada pegawai di bidang akuntansi dan keuangan setiap SKPD Pemerintah Kota Malang. Metode analisa data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan penatausahaan aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pengawasan inspektorat dan komitmen manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Kata Kunci: sistem pengendalian internal, pengawasan inspektorat, penatausahaan aset tetap, komitmen manajemen, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh pemerintah daerah di bawahnya, dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, atau yang biasa disebut dengan otonomi daerah. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, untuk memperjelas bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah, termasuk di dalamnya kewenangan untuk pengelolaan barang milik daerah atau aset daerah. Hal ini menjadikan pemerintah daerah selayaknya agen dalam teori agensi, yang memiliki kewajiban untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya secara transparan dan akuntabilitas kepada prinsipal yaitu pemerintahan di atasnya dan masyarakat, sebagai pihak pemberi mandat dan pemilik dana. Bentuk dari pertanggungjawaban ini diwujudkan dengan disusunnya laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan sarana yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah haruslah dapat memberikan informasi yang berkualitas bagi para penggunanya. Baik atau tidaknya kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat diukur berdasarkan karakteristik kualitatifnya. Sebelum dipublikasikan kepada masyarakat luas, laporan keuangan pemerintah daerah akan diperiksa dan dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku badan independen untuk menilai kualitas dari laporan keuangan yang disajikan oleh setiap pemerintah daerah. Di provinsi Jawa Timur, dari 38 pemerintah kabupaten dan kota sebanyak 36 pemerintah daerah diantaranya telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2019. Salah satu pemerintah

daerah yang berhasil dan konsisten mempertahankan opini WTP, yaitu Pemerintah Kota Malang.

Secara lebih lanjut BPK tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan, namun juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal memiliki peranan penting dalam menjamin kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan. Kehadiran sistem pengendalian internal dapat menjadi penjamin keyakinan yang memadai atas informasi dari laporan keuangan yang disajikan. Selain itu, dengan adanya sistem pengendalian internal dapat meningkatkan pengawasan dari pihak prinsipal terhadap kemungkinan tindak kecurangan yang dilakukan oleh agen.

Meskipun Pemerintah Kota Malang selalu berhasil dan konsisten dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangannya, dalam dua tahun terakhir BPK melalui siaran persnya menyampaikan adanya permasalahan yang berkaitan dengan aset tetap terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Malang. Pada laporan keuangan tahun 2018 ditemukan adanya permasalahan dalam penatausahaan aset tetap yang belum tertib, sedangkan pada laporan keuangan tahun 2019 ditemukan adanya permasalahan dalam pengelolaan aset tetap yang belum memadai. (www.jatim.bpk.go.id).

Temuan BPK ini, mengindikasikan adanya kelemahan inspektorat daerah Kota Malang dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan di tingkat daerah, bentuk pengawasan inspektorat adalah dengan melakukan reviu terhadap laporan keuangan pemerintah daerah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku diiringi dengan sistem pengendalian internal yang memadai. Selain itu, masih adanya temuan tersebut mengindikasikan pula kurangnya komitmen dari pimpinan di tiap-tiap SKPD terkait untuk mau menindaklanjuti temuan tersebut. Adanya komitmen dari pimpinan selaku manajemen di SKPD, dimaksudkan agar tujuan pemerintah daerah untuk transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan dapat terwujud.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa faktor, seperti sistem pengendalian internal, penatausahaan aset tetap, pengawasan inspektorat daerah, dan komitmen manajemen yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pejabat dan pegawai di bidang akuntansi dan keuangan di lingkungan SKPD Pemerintah Kota Malang. Pemilihan SKPD Pemerintah Kota Malang sebagai objek penelitian, dikarenakan opini laporan keuangan Pemerintah Kota Malang selalu konsisten mendapatkan opini WTP dalam sembilan tahun terakhir, sehingga dapat dijadikan percontohan dan motivasi bagi pemerintah daerah yang lainnya agar semakin baik.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori keagenan menjelaskan bahwa terdapat hubungan kontraktual antara dua pihak atau lebih, dengan salah satu pihak disebut sebagai agen dan pihak lainnya disebut pemangku kepentingan (*principal*). Dalam kaitannya dengan sektor pemerintahan, teori keagenan memandang pemerintah selaku agen yang diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk dapat mengelola keuangan yang bersumber dari rakyat dengan sebaik mungkin. Sebagai agen, tidak menutup kemungkinan pemerintah untuk melakukan tindak kecurangan pengelolaan keuangan negara demi kepentingannya pribadi dan golongan tertentu.

Atas dasar tersebut diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang diwujudkan dengan disusunnya laporan keuangan pemerintah yang berkualitas, yang dalam proses penyusunannya harus diiringi dengan sistem pengendalian internal dan kegiatan penatausahaan yang baik, pengawasan dari inspektorat daerah selaku aparat pengawas internal, dan komitmen manajemen di masing-masing SKPD.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian internal merupakan sistem yang dirancang oleh manajemen atau pimpinan instansi untuk diterapkan secara menyeluruh di lingkungan organisasi. Pengendalian sendiri adalah salah satu fungsi dari manajemen dalam organisasi untuk memastikan organisasi masih berjalan di arah yang tepat sesuai tujuan organisasi (Ompusunggu dan Salomo, 2018). Ditinjau dari teori agensi, penerapan sistem pengendalian internal dalam proses penyusunan laporan keuangan dapat meningkatkan pengawasan atau kontrol yang bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan kecurangan yang dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja. Penerapan sistem pengendalian internal yang tidak maksimal dapat menyebabkan terjadinya tindak penyimpangan dan kemungkinan tidak terdeteksinya kecurangan maupun kesalahan yang terjadi di dalam organisasi. Kelemahan sistem pengendalian dapat berdampak pada informasi yang terkandung dalam laporan keuangan menjadi kurang berkualitas dikarenakan tidak memenuhi salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu keandalan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pramudiarta dan Juliarto (2015) dalam penelitiannya tentang kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah Daerah menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap nilai informasi laporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah. Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dipaparkan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Pengaruh Pengawasan Inspektorat terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Inspektorat daerah selaku aparat pengawas atau auditor internal milik pemerintah daerah tidak hanya memiliki kewajiban sebagai pengawas atas penyelenggaraan urusan pemerintah. Namun juga harus melakukan pembinaan terhadap satuan kerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Pembinaan yang dilakukan oleh inspektorat daerah, yaitu konsultasi dengan pimpinan organisasi selaku manajemen dari organisasi dan memberikan pertimbangan mengenai risiko yang dihadapi organisasi. Tujuan diadakannya kegiatan pengawasan dan pembinaan oleh inspektorat daerah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap kepatuhan, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu inspektorat daerah sebagai auditor internal diharapkan memiliki peranan penting untuk melakukan pencegahan terhadap kemungkinan adanya kesalahan dalam laporan keuangan, melalui proses reviu terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sebelum diserahkan kepada BPK untuk diaudit dan dilakukan penilaian. Dalam melakukan reviu laporan keuangan, inspektorat daerah harus memiliki kompetensi yang cukup untuk memahami garis besar dari transaksi entitas, sistem dan prosedur akuntansi, bentuk catatan akuntansi dan basis akuntansi yang digunakan (Nova, 2015). Diharapkan setelah adanya proses reviu ini, jika terdapat rekomendasi atas temuan inspektorat dapat ditindaklanjuti agar kualitas laporan keuangan yang dihasilkan semakin baik. Dengan demikian, semakin baik peran inspektorat daerah sebagai auditor internal diharapkan dapat menunjang kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Husna (2017) tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem

pengendalian intern, dan peran inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa peran inspektorat berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dipaparkan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Pengawasan inspektorat daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Aset merupakan salah satu pos di dalam neraca laporan keuangan yang memiliki nilai cukup besar. Mengingat besarnya nilai aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, diperlukan adanya penatausahaan yang baik terhadap aset-aset tersebut. Penatausahaan aset sendiri memiliki tujuan untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat mengenai aset-aset milik pemerintah daerah, yang akan digunakan sebagai bahan acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, baik buruknya penatausahaan aset yang dilakukan oleh tiap-tiap SKPD dapat mempengaruhi kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andiani, Hapsari, dan Muslih (2017) tentang pengaruh penatausahaan dan penerapan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa kegiatan penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

H₃ : Penatausahaan aset tetap berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Komitmen Manajemen terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam sebuah unit organisasi komitmen manajemen sangatlah penting untuk menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Hal ini dikarenakan manajemen merupakan pimpinan organisasi, menjadikan manajemen sebagai pihak yang membuat kebijakan dan menentukan arah dari suatu organisasi. Dalam lingkup organisasi sektor publik (pemerintahan), komitmen yang kuat dari seorang manajemen diharapkan dapat memotivasi dan mendorong para pegawainya untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya, yang pada akhirnya dapat mendorong tercapainya tujuan pemerintah. Salah satunya adalah terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggaraeni, Purnamawati, dan Atmadja (2015) yang menguji pengaruh komitmen manajemen terhadap keterandalan pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Badung menyimpulkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap keterandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Andal sendiri merupakan salah satu syarat laporan keuangan yang berkualitas, hal ini menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dipaparkan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₄ : Komitmen manajemen berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

METODE PENELITIAN

Jenis dan Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer ini berasal dari jawaban responden atas kuesioner yang telah dibagikan sebelumnya. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di bidang akuntansi dan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Penentuan sampel yang digunakan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria yang digunakan adalah pegawai yang bersangkutan bekerja di bidang atau bagian keuangan untuk melaksanakan fungsi akuntansi/penatausahaan keuangan di SKPD Pemerintah Kota Malang dengan lama bekerja minimal satu tahun. Alasan pemilihan kriteria ini bertujuan agar pegawai yang menjadi sampel penelitian merupakan pegawai yang ahli di bidangnya dan telah memiliki pengalaman dalam menyusun laporan keuangan SKPD sebelumnya.

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat variabel independen yang terdiri dari sistem pengendalian internal, pengawasan inspektorat, penatausahaan aset tetap dan komitmen untuk diuji pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependennya.

Kualitas laporan keuangan dilihat berdasarkan karakteristik kualitatifnya. Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diukur dengan mengacu pada karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Adapun indikator yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dipahami, dan (4) dapat dibandingkan.

Sistem pengendalian internal adalah salah satu cara pencegahan, pengawasan, dan pendeteksian kecurangan yang dilakukan oleh suatu organisasi. Variabel sistem pengendalian internal diukur dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, indikator yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan pengendalian intern.

Inspektorat daerah merupakan pembantu kepala daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh satuan kerja perangkat daerah. Sebagai aparat pengawas internal, inspektorat daerah menjalankan perannya melalui kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengukuran variabel penelitian mengacu pada Tampubolon dalam Torar (2018) melalui 3 indikator yaitu: (1) pengawas, (2) konsultan, dan (3) katalis.

Besarnya nilai aset tetap yang dikuasai oleh pemerintah daerah menjadikan penatausahaan aset tetap haruslah dilakukan dengan sebaik mungkin. Variabel penatausahaan aset tetap diukur dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, indikator yang digunakan adalah sebagai berikut: (1), pembukuan, (2) inventarisasi, dan (3) pelaporan.

Dalam upaya menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan adanya komitmen dari manajemen untuk memberikan arahan dan membuat kebijakan untuk para pegawainya agar bekerja secara profesional sesuai dengan fungsinya. Pengukuran variabel komitmen manajemen dilakukan dengan mengacu pada indikator yang digunakan oleh Supriadi, Hallah, dan Kartini (2017) dalam mengukur komitmen manajemen atau pimpinan yaitu, (1) adanya kebijakan, (2) alokasi sumber daya, (3) sosialisasi, dan (4) pelatihan.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan terdiri dari beberapa pengujian yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji realibilitas untuk memastikan bahwa item yang digunakan dalam penelitian telah valid dan reliabel. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa data yang terkumpul berdistribusi normal dan terbebas dari penyimpangan melalui uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan untuk dapat menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan melalui analisis regresi berganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tujuan dilakukannya uji validitas adalah untuk menguji apakah item pertanyaan yang diajukan dalam penelitian telah valid atau tidak. Pengujian validitas dilakukan dengan memperhatikan nilai *Pearson Correlation* setiap item pertanyaan, baik pertanyaan untuk variabel independen maupun pertanyaan untuk variabel dependen. Item pernyataan dinyatakan valid jika nilai *Pearson Correlation* lebih besar daripada nilai r-tabel. Berdasarkan perhitungan, nilai r-tabel untuk data dengan jumlah responden sebanyak 67 orang dan taraf signifikansi 5% adalah sebesar 0.240. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, seluruh item pernyataan yang diajukan dalam kuesioner memiliki nilai r-hitung yang lebih besar dari r-tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan telah valid.

Uji Realibilitas

Tujuan uji reliabilitas adalah untuk mengetahui keandalan dan konsistensi hasil pengukuran jika pengukuran dilakukan kembali atau berulang terhadap objek dan alat ukur yang sama. Instrumen penelitian dinyatakan reliabel jika besar nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0.6. Berdasarkan pada tabel 1 dapat diketahui bahwa setiap variabel yang diujikan dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0.60. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang digunakan sebagai instrumen penelitian telah reliabel.

Tabel 1
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal	0.914	Reliabel
Pengawasan Inspektorat	0.859	Reliabel
Penatausahaan Aset Tetap	0.889	Reliabel
Komitmen Manajemen	0.825	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0.941	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2021

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah nilai residual antara variabel independen dan variabel dependen terdistribusi dengan normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Berikut hasil uji normalitas data dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov:

Tabel 2
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		67
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.92214717
Most Extreme Differences	Absolute	.104
	Positive	.104
	Negative	-.093
Test Statistic		.104
Asymp. Sig. (2-tailed)		.069

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.069. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0.05 ($p > 0.05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi.

Uji Multikolinieritas

Tujuan dari uji multikolinieritas adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Ada atau tidaknya gejala multikolinieritas dalam model regresi dapat dilakukan dengan memperhatikan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) maupun nilai tolerance. Jika menggunakan nilai VIF sebagai acuan, data dinyatakan terbebas dari gejala multikolinieritas jika besar nilai VIF kurang dari 10.00. Namun, jika menggunakan nilai tolerance sebagai acuan, data dinyatakan terbebas dari gejala multikolinieritas jika besar nilai tolerance lebih besar dari 0.10.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Sistem Pengendalian Internal	0.410	2.437
Pengawasan Inspektorat	0.514	1.945
Penatausahaan Aset Tetap	0.362	2.762
Komitmen Manajemen	0.372	2.691

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0.10 dan nilai VIF kurang dari 10.00, maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak ditemukan adanya gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan dengan pengamatan yang lainnya. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glesjer. Model regresi dinyatakan terbebas dari gejala heteroskedastisitas jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05. berikut hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glesjer:

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
Sistem Pengendalian Internal	0.758
Pengawasan Inspektorat	0.786
Penatausahaan Aset Tetap	0.451
Komitmen Manajemen	0.602

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda. Pemilihan analisis regresi linier ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau terpisah. Dalam proses pengujian hipotesis dilakukan melalui dua tahapan yaitu koefisien determinasi untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel yang diujikan dan melalui uji parsial (uji t) untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah.

Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menjelaskan seberapa besar presentase pengaruh variabel independen dalam memengaruhi variabel dependen secara simultan. Uji koefisien determinasi dilakukan dengan memperhatikan nilai *adjusted R square*. Hasil pengujian koefisien determinasi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,806	0,650	0,627	3,015

Sumber: Data diolah, 2021

Pada tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,650 yang menunjukkan bahwa secara simultan, variabel-variabel independen dalam penelitian yaitu sistem pengendalian internal, pengawasan inspektorat, penatausahaan aset tetap, dan komitmen manajemen mempengaruhi variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,650 atau 65%. Hal ini menjelaskan bahwa terdapat 35% faktor lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian, yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial atau yang biasa disebut uji t bertujuan untuk menjelaskan ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (terpisah). Uji parsial dilakukan dengan cara, yaitu membandingkan besar nilai t hitung dengan t tabel dan juga dengan cara membandingkan nilai signifikansi masing-masing variabel independen.

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.001	4.716		.212	.833
Sistem Pengendalian Internal	.369	.124	.349	2.979	.004
Pengawasan Inspektorat	.076	.147	.054	.519	.605
Penatausahaan Aset Tetap	.928	.236	.491	3.929	.000
Komitmen Manajemen	-.011	.167	-.008	-.068	.946

a. Dependent Variable: Kualitas LKPD
Sumber: Data diolah, 2021

Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial atau yang biasa disebut uji t bertujuan untuk menjelaskan ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (terpisah). Uji parsial dilakukan dengan cara, yaitu membandingkan besar nilai t hitung dengan t tabel dan juga dengan cara membandingkan nilai signifikansi masing-masing variabel independen.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil uji parsial (uji t) yang telah dilakukan pada variabel sistem pengendalian internal, diketahui bahwa nilai t hitung yang lebih besar dari nilai t tabel (2,979) dengan nilai signifikansi (0,004) yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, menjadikan hipotesis H1 dapat diterima. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudarsono dan Darsono (2017), Surastiani dan Handayani (2015) dan Husna (2017) yang menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Pengimplementasian sistem pengendalian internal yang tepat dan sesuai, dengan ditinjau dari indikator lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan mampu memberikan dampak yang positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Indikator-indikator tersebut dijabarkan dan diwujudkan dalam kegiatan operasional satuan kerja perangkat daerah di Pemerintah Kota Malang, di antaranya seperti adanya pengendalian fisik atas aset yang dimiliki, pencatatan transaksi yang disertai dengan bukti transaksi yang sah, dan adanya upaya untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan, menjadikan laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Malang memiliki kualitas informasi yang baik dan dapat bermanfaat bagi para penggunanya. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa dengan diimplementasikannya sistem pengendalian internal yang baik, dapat meminimalisir kecurangan yang mungkin dilakukan yang berdampak pada laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Hasil uji parsial (uji t) yang telah dilakukan pada variabel pengawasan inspektorat memiliki nilai t hitung yang kurang dari nilai t tabel (0,519) dengan nilai signifikansi (0,605) yang lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, menjadikan hipotesis H2 ditolak. Hasil penelitian ini

tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nova (2015) dan penelitian Husna (2017) yang menyimpulkan bahwa peran inspektorat memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 24 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat disebutkan bahwa inspektorat daerah memiliki fungsi untuk melakukan reviu terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, tidak disebutkan secara lebih lanjut bahwa inspektorat memiliki tugas untuk memastikan saran ataupun rekomendasi yang telah diberikan, telah dilakukan tindak lanjut oleh masing-masing SKPD. Hal ini menunjukkan inspektorat selaku auditor internal pemerintah hanya menekankan perannya sebagai pengawas sedangkan peran sebagai konsultan dan katalis masih kurang optimal, menjadikan hasil penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan.

Hasil uji parsial (uji t) pada variabel penatausahaan aset tetap memiliki nilai t hitung yang lebih besar dari nilai t tabel (3,929) dengan nilai signifikansi (0,000) yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, menjadikan hipotesis H3 dapat diterima. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widiati, Nugraha, dan Novianty (2021) dan penelitian Febrianti (2016) yang menyimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kegiatan penatausahaan aset tetap di instansi pemerintah daerah dapat ditinjau dari rangkaian kegiatan yang dilakukan, mulai dari kegiatan pembukuan, kegiatan inventarisasi, dan berakhir pada kegiatan pelaporan. Dalam upaya melakukan pengendalian atas aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, kegiatan penatausahaan aset tetap ini bertujuan agar aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat diketahui keberadaannya dan diketahui kondisi serta besaran nilainya. Kegiatan penatausahaan ini bertujuan agar besaran nilai aset yang dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai sebagaimana mestinya. Dikarenakan kegiatan penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan menjadikan setiap prosesnya harus dilakukan dengan baik dan teliti, karena jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya akan berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa baik buruknya kegiatan penatausahaan aset tetap yang dilakukan dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil uji parsial (uji t) pada variabel komitmen manajemen memiliki nilai t hitung yang kurang dari nilai t tabel (-0,068) dengan nilai signifikansi (0,946) yang lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara komitmen manajemen terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, menjadikan hipotesis H4 ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggaraeni, Purnamawati, dan Atmadja (2015) yang menyatakan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Badung. Keterandalan sendiri merupakan salah satu karakteristik kualitatif yang harusnya dimiliki oleh setiap laporan keuangan, untuk menunjukkan bahwa informasi di dalam laporan keuangan berkualitas.

Sebagai pegawai pemerintahan sudah menjadi keharusan bersikap bertanggung jawab dan profesional dalam berkerja sesuai dengan tupoksinya. Atas dasar tersebut, meskipun ada atau tidaknya komitmen pimpinan satuan kerja perangkat daerah selaku manajemen. Para pegawai di lingkungan pemerintahan akan selalu berupaya untuk bekerja dengan sebaik mungkin sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan untuk mendukung upaya tercapainya tujuan organisasi. Selain itu, pada proses perekrutan pegawai maupun pendelegasian wewenang kepada setiap pegawai telah disesuaikan dengan kompetensi yang

dimiliki setiap pegawai, yang dapat ditinjau dari latar belakang pegawai maupun pengalaman yang dimiliki oleh setiap pegawai sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang akan diemban. Hal ini menjadikan adanya atau tidaknya kebijakan yang diwujudkan dalam instruksi dari pimpinan, pengalokasian sarana dan prasana yang mendukung kegiatan operasional organisasi, sosialisasi dan pelatihan kepada setiap pegawai tidak berpengaruh terlalu signifikan terhadap kinerja organisasi, yang dapat dinilai dari laporan keuangan yang dihasilkan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin baik penerapan sistem pengendalian internal akan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
2. Pengawasan inspektorat tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam menjalankan tupoksinya inspektorat daerah tidak memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa saran ataupun rekomendasi yang ada telah ditindaklanjuti. Hal ini menjadikan inspektorat lebih menekankan perannya sebagai pengawas dibanding peran yang lainnya, menjadikan pengawasan yang diberikan inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh secara signifikan.
3. Penatausahaan aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai sebuah rangkaian kegiatan, kesalahan yang terjadi dalam kegiatan penatausahaan akan berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kegiatan penatausahaan aset yang dilakukan, semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.
4. Komitmen manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan sebagai pegawai atau aparat pemerintahan sudah menjadi keharusan bagi setiap pegawai untuk bersikap profesional dan bertanggungjawab sesuai dengan tupoksinya, sehingga ada atau tidaknya komitmen manajemen tidak akan begitu berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang dapat ditinjau dari kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiani, Novira J., Hapsari. Dini W. & Muslih M. (2017). Pengaruh Penatausahaan dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta). *E-Proceeding of Management*, 4 (3). 2796-2803.
- Anggaraeni, M, Purnamawati. I G. A., & Atmadja, Anantawikrama T. (2015). Pengaruh Pengawasan Keuangan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, dan Komitmen Manajemen Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada 15 Dinas di SKPD Kabupaten Badung). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1).
- Febrianti, Sukma. (2016). Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 10(1). 151-171.

- Husna, Tissa N. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Peran Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Pekanbaru). *JOM FEKON*, 4(1). 2835-2849.
- Nova, Wati S. (2015). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Komitmen Karyawan, dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Universitas Negeri Padang, Padang).
- Ompusunggu, Sensia G. & Salomo, Roy V. (2018). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2). 72-80
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4876>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138973>.
- Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/48944>.
- Pramudiarta, Rizal & Juliarto, Agung. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Inter terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah (Studi Persepsi Pegawai SKPD di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 1-14
- Sudarsono, Galih & Darsono. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Grobogan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2), 1-10.
- Supriadi, Haliah, & Kartini. (2017). Pengaruh Komitmen Pimpinan terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Studi pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS*.
- Torar, R. (2018). Analisis Peran Inspektorat Kabupaten Sebagai Auditor Internal “Studi Kasus di Kabupaten Klaten”. (Skripsi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta).
- Widiati, Wini, Nugraha, Arie A. & Novianty, Ira. (2021). Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 253-260